

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN KOTA BOGOR



2022

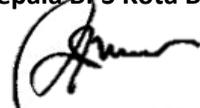
## KATA PENGANTAR

Publikasi **Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2022** adalah salah satu publikasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor pada tahun 2022. Publikasi ini mencoba menggambarkan bagaimana kondisi kesejahteraan penduduk yang ada di Kota Bogor antar waktu. Berbagai indikator yang disediakan meliputi berbagai indikator, seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan, dan kemiskinan.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor tahun 2022 merupakan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan BPS Kota Bogor dan data dari dinas serta lembaga terkait. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan data dan kondisi kesejahteraan penduduk di Kota Bogor beserta dengan faktor-faktor yang memengaruhinya dapat lebih mudah tersampaikan. Sehingga informasi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak serta dapat menunjang program pembangunan manusia dan wilayah Kota Bogor.

Ucapan terimakasih kami sampaikan sebesar-besarnya terhadap seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

**Bogor, September 2023**  
**Kepala BPS Kota Bogor**



**Dr. Daryanto, SST, MM.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	v
<b>I KEPENDUDUKAN</b> .....	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	2
1.2 Kepadatan Penduduk.....	3
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .....	4
1.4 Fertilitas .....	6
1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama .....	7
1.6 Penggunaan Alat / Cara KB .....	8
<b>II KESEHATAN DAN GIZI</b> .....	11
2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	12
2.2. Tingkat Imunitas dan Gizi Balita .....	15
2.3. Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan .....	17
<b>III PENDIDIKAN</b> .....	19
3.1. Kemampuan Membaca dan Menulis.....	20
3.2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .....	21
3.3. Tingkat Pendidikan.....	22
3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM) .....	24

<b>IV</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b> .....	28
	4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	29
	4.2. Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan .....	32
	4.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan .....	34
<b>V</b>	<b>TARAF DAN POLA KONSUMSI</b> .....	36
	5.1. Pengeluaran Rumah Tangga .....	37
	5.2. Konsumsi Energi dan Protein) .....	42
<b>VI</b>	<b>PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN</b> .....	44
	6.1. Kualitas Rumah Tinggal.....	45
	6.2. Fasilitas Rumah Tinggal.....	47
	6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	48
<b>VII</b>	<b>KEMISKINAN</b> .....	50
	7.1. Dinamika Penduduk Miskin .....	52
	7.2. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) .....	54
	7.3. Karakteristik Pendidikan .....	56
	7.4. Karakteristik Ketenagakerjaan .....	57
	7.5. Karakteristik Perumahan .....	59
	7.6. Dukungan Pemerintah Kepada Rumah Tangga Miskin .....	61
	7.7. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu, 2022.....	14
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2022.....	18
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2022.....	20
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Jawa Barat, 2022	25
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Jenis Pengeluaran di Kota Bogor, 2022.....	38
Tabel 5.2	Persentase Pengeluaran Menurut Kelompok Barang dan Kelompok Pengeluaran di Kota Bogor, 2022.....	39
Tabel 5.3	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kota Bogor, 2022 .....	40
Tabel 5.4	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan per Kapita per Bulan di Kota Bogor, 2020 – 2022.....	43
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2019 - 2022.....	46
Tabel 7.1	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Program Raskin, Program Indonesia Pintar, Kartu Perlindungan Sosial dan Program Keluarga Harapan di Kota Bogor, 2019 – 2022.....	47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bogor Tahun 2018 - 2022.....	3
Grafik 1.2	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup> di Kota Bogor Tahun 2022.....	4
Grafik 1.3	Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Bogor, 2022.....	5
Grafik 1.4	Rasio Ketergantungan Penduduk Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022.....	6
Grafik 1.5	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus yang Pernah Kawin dan Alat/Cara KB di Kota Bogor, 2022.....	9
Grafik 1.6	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Tempat Penggunaan Alat/Cara KB, 2022.....	10
Grafik 2.1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat , 2017 – 2022.....	12
Grafik 2.2	Persentase Angka Kesakitan Menurut Kelompok Pengeluaran selama Setahun Terakhir di Kota Bogor, 2022.....	13
Grafik 2.3	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Bogor, 2022.....	17
Grafik 3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama sekolah di Kota Bogor , 2018 – 2022.....	21
Grafik 3.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2022.....	23
Grafik 3.3	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kota Bogor, 2022.....	24
Grafik 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bogor , 2022.....	26
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Bogor, Agustus 2018-2022.....	30
Grafik 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Bogor, 2018 – 2022....	31
Grafik 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor, 2018 – 2022.....	32
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Bogor, 2022.....	33
Grafik 4.5	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bogor, 2022.....	35
Grafik 5.1	Indeks Gini Rasio di Kota Bogor, 2018 – 2022.....	41
Grafik 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Bogor , tahun 2022.....	49

Grafik 7.1	Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor Tahun 2018 – 2022.....	53
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan di Kota Bogor, 2018 - 2022 (Rupiah/Kapita/Bulan) .....	54
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor, 2018 – 2022.....	55
Grafik 7.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2022.....	57
Grafik 7.5	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kabupaten / Kota di Jawa Barat, 2022.....	58
Grafik 7.6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Sektor Bekerja di Kota Bogor, 2022.....	59
Grafik 7.7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Bogor, Tahun 2022....	60
Grafik 7.8	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dan Alat yang Digunakan untuk Mengakses Internet di Kota Bogor, 2022 .....	63

# 1 Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap

permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Proyeksi penduduk Kota Bogor berdasarkan pada tahun 2022 adalah 1.063.513 jiwa penduduk, terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 539.250 jiwa (50,70 persen) dan Perempuan sebanyak 524.263 jiwa (49,30 persen). Rasio jenis kelamin sebesar 103, yang berarti jumlah penduduk Laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk Perempuan.

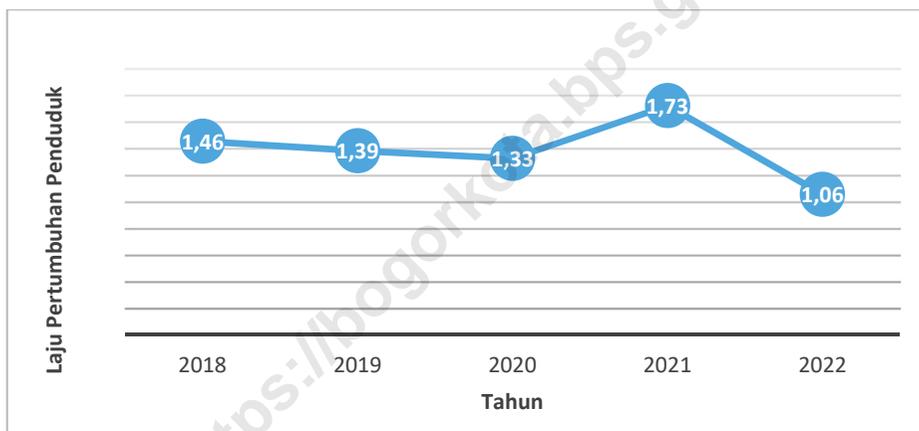
### **1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Tidak terkendalinya jumlah penduduk di suatu wilayah akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat kedepannya. Untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk yang berlebih, pemerintah harus menerapkan program yang tepat untuk menanggulangnya. Berbagai dampak yang kita rasakan dari kepadatan penduduk yang tidak terkendali adalah kemacetan lalu lintas serta buruknya sanitasi di permukiman kumuh. Selain pengendalian terhadap tingginya pertumbuhan penduduk, pemerintah juga harus mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tingginya kepadatan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga kualitas kehidupan masyarakat Kota Bogor akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Bogor selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bogor mengalami kenaikan sebanyak

11.154 jiwa pada tahun 2022 menjadi 1.063.513 jiwa. Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 hingga tahun 2020, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami penurunan. Sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 1,73 persen dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen.

**Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bogor  
Tahun 2018 – 2022**



Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

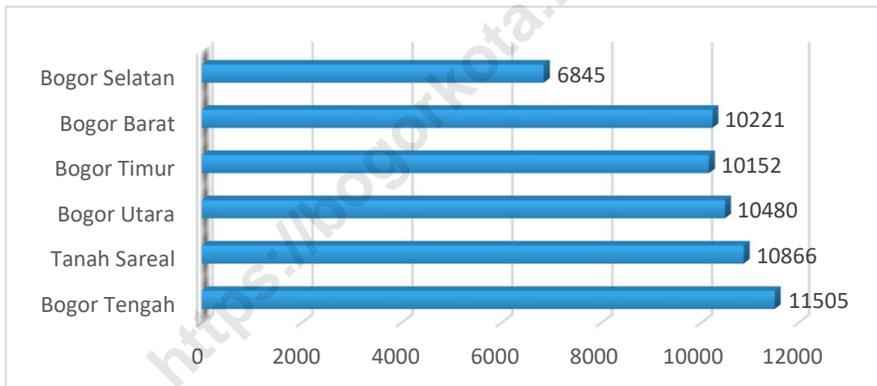
## 1.2 Kepadatan Penduduk

Persoalan lain yang terkait dengan dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan distribusi penduduk yang tidak merata. Jika dilihat dari kepadatan penduduk di Kota Bogor, terlihat di wilayah Kecamatan Bogor Tengah lebih padat dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Hal ini disebabkan Kecamatan Bogor Tengah merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kota Bogor. Dari Grafik 1.2 terlihat Kecamatan Bogor Tengah menjadi daerah terpadat dengan tingkat kepadatan

mencapai 11.505 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan terpadat berikutnya adalah Kecamatan Tanah Sareal dengan kepadatan penduduk 10.866 jiwa per km<sup>2</sup>.

Sedangkan Kecamatan Bogor Selatan memiliki kepadatan penduduk terkecil jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Bogor. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bogor Selatan mencapai 6.845 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat banyak lahan yang dipergunakan untuk lahan pertanian.

**Grafik 1.2. Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup> di Kota Bogor Tahun 2022**



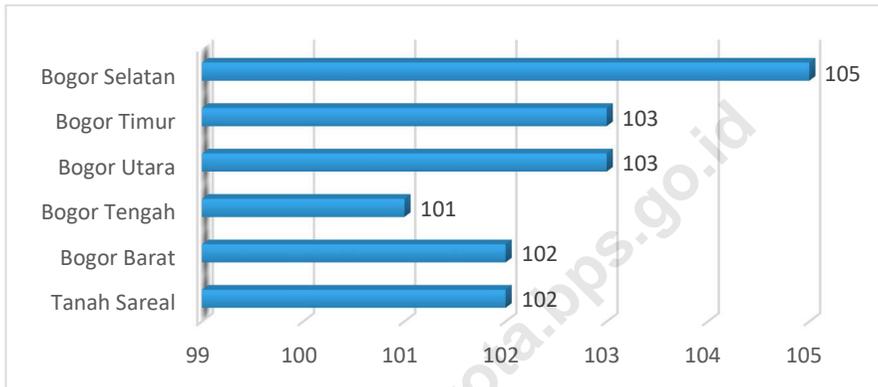
Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

### 1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang

produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Grafik 1.3. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022**



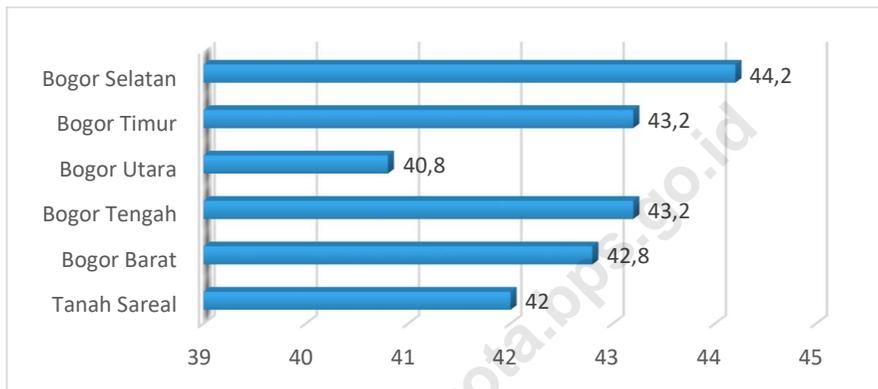
Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Komposisi penduduk Kota Bogor jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2022 sebesar 103. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 103 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Apabila kita lihat rasio jenis kelamin tiap Kecamatan di Kota Bogor, maka dari 6 Kecamatan seluruhnya memiliki rasio jenis kelamin di atas 100. Hal ini mengindikasikan bahwa di enam Kecamatan tersebut jumlah penduduk perempuan lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan

ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

**Grafik 1.4. Rasio Ketergantungan Penduduk Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2022**



Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 42,6, mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

#### 1.4 Fertilitas

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah

penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas yang tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian yang rendah.

Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas salah satunya adalah Angka Kelahiran Total (TFR). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya, dan digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka menekan jumlah kelahiran di wilayah tersebut. Seperti halnya program KB yang sejak dulu sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka kelahiran serta meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi.

### **1.5 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama**

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu pertambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022, sebagian besar wanita di Kota Bogor melakukan perkawinan pertamanya pada usia lebih dari 19 tahun yaitu sebesar 75,35 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya pun kelompok usia ini masih mendominasi usia perkawinan pertama. Dengan kata lain sebagian besar wanita di Kota Bogor menjalani perkawinan di usia yang sudah ideal. Yang perlu kita telaah lebih lanjut yaitu pada tahun 2020 wanita yang melakukan perkawinan pertama di usia kurang dari 16 tahun, meskipun memiliki persentasenya paling sedikit namun tetap memerlukan perhatian khusus. Persentase wanita di Kota Bogor berusia kurang dari 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 9,86 persen.

## **1.6 Penggunaan Alat/Cara KB**

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 di Kota Bogor, 14,81 persen dari wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin pernah menggunakan alat/cara KB

dan sudah tidak menggunakan lagi, sebanyak 41,61 persen sedang menggunakan alat/cara KB, dan sebanyak 43,59 persen dari wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus kawin tidak pernah menggunakan alat/cara KB. Mengingat pentingnya penggunaan KB untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu wilayah, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena hampir separuh dari wanita berstatus kawin tidak menggunakan KB.

**Grafik 1.5. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Penggunaan Alat/Cara KB di Kota Bogor, 2022**

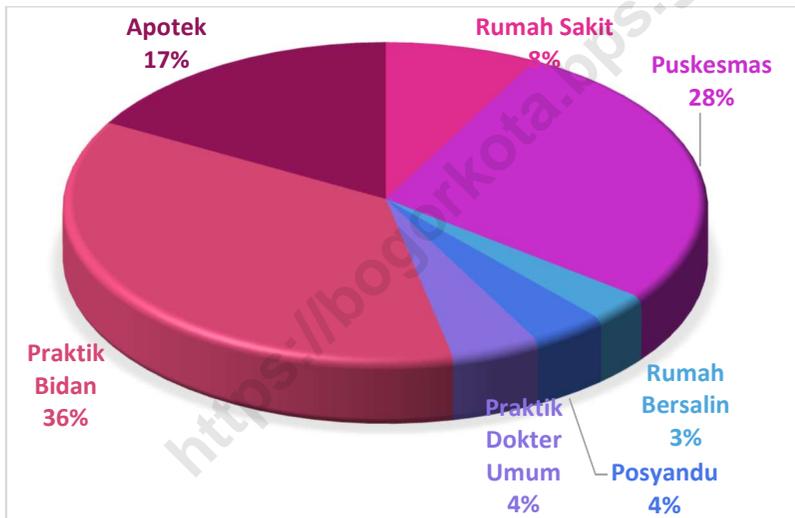


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2022

Salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan alat KB adalah kemudahan dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Ketersediaan layanan konsultasi dan tindakan KB secara gratis melalui berbagai fasilitas kesehatan oleh pemerintah akan meningkatkan jumlah pengguna KB. Semakin tinggi pengguna KB, maka jumlah penduduk akan terkendali dan terencana, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dan cepat menjangkau kesejahteraan.

Grafik 1.5 menunjukkan bahwa masyarakat paling banyak menggunakan fasilitas kesehatan praktik bidan untuk pemasangan alat KB. Praktik bidan dipilih oleh masyarakat karena keberadaannya yang banyak dan tersebar hingga pelosok wilayah. Pemakaian terbanyak kedua adalah di puskesmas, dimana masyarakat tidak dipungut biaya untuk memasang alat KB.

**Grafik 1.5. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Tempat Penggunaan Alat/Cara KB di Kota Bogor, 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat 2022

## 2 Kesehatan dan Gizi

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk. Sehingga tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta secara bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

## 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

**Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)**

**Kota Bogor dan Propinsi Jawa Barat , 2018-2022**



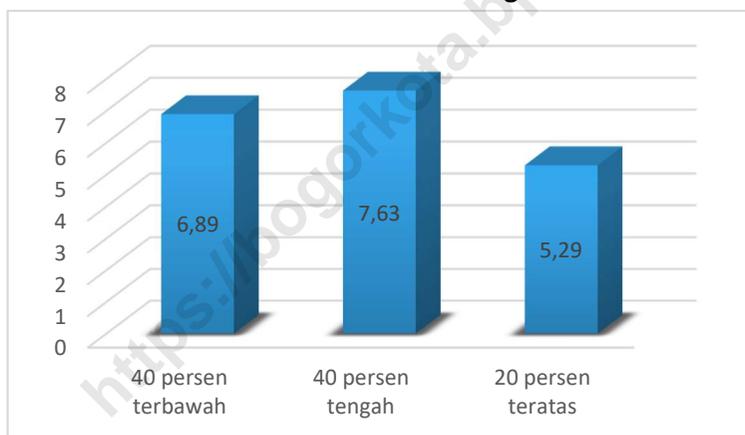
Sumber : BPS Kota Bogor, 2022

Dimensi kesehatan bisa dilihat dari Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2021 hingga 2022, Kota Bogor telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,31 tahun. Grafik 2.1 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kota Bogor lebih tinggi dibanding Angka Harapan Hidup Propinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Bogor sebesar 73,82 tahun sedangkan Angka Harapan Hidup Jawa Barat 73,23 tahun, dan pada tahun 2022 Angka Harapan Hidup Kota Bogor telah mencapai 74,13 tahun, sedangkan di Jawa Barat Angka Harapan Hidupnya 73,52 tahun.

Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Bogor mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

**Grafik 2.2 Persentase Angka Kesakitan Menurut Kelompok Pengeluaran selama Setahun Terakhir di Kota Bogor Tahun 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2022 rata-rata lama rawat inap penduduk berada pada kisaran 3 hari atau kurang. Penduduk di kota Bogor paling banyak mengalami rawat inap selama kurang dari 3 hari yaitu sebesar 40,86 persen pada tahun 2022. Sementara persentase yang mengalami rawat inap selama 4 sampai 6 hari di tahun 2021 sebanyak 20,15 persen. Penduduk yang mengalami rawat inap lebih dari 7 hari sebesar yaitu 38,99 persen .

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya kegiatan sehari-hari terhadap total penduduk. Angka kesakitan yang dialami penduduk merupakan salah satu

indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan yang dialami penduduk di suatu wilayah. Angka kesakitan Kota Bogor pada tahun 2022 adalah sebesar 6,87 persen. Grafik 2.2 menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki keluhan kesehatan terbesar adalah kelompok pengeluaran 40 persen tengah. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang menderita sakit lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Sebanyak 7,18 persen dari laki-laki dan sebanyak 6,55 persen dari total penduduk perempuan mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-harinya.

**Tabel 2.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu Tahun 2022**

Jenis Program Perlindungan Sosial	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok (%)	26,76	32,12	18,06
Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu (%)	57,69	73,09	87,75

Sumber : Susenas Kota Bogor, 2021

Merokok sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok paling besar adalah kelompok dengan pengeluaran 40 persen tengah. Sebanyak 32,12 persen penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen tengah. Rata-rata batang rokok yang dihisap perminggu terbanyak berada pada kelompok dengan pengeluaran 20 persen teratas, dengan jumlah mencapai 87,75 batang rokok.

## 2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

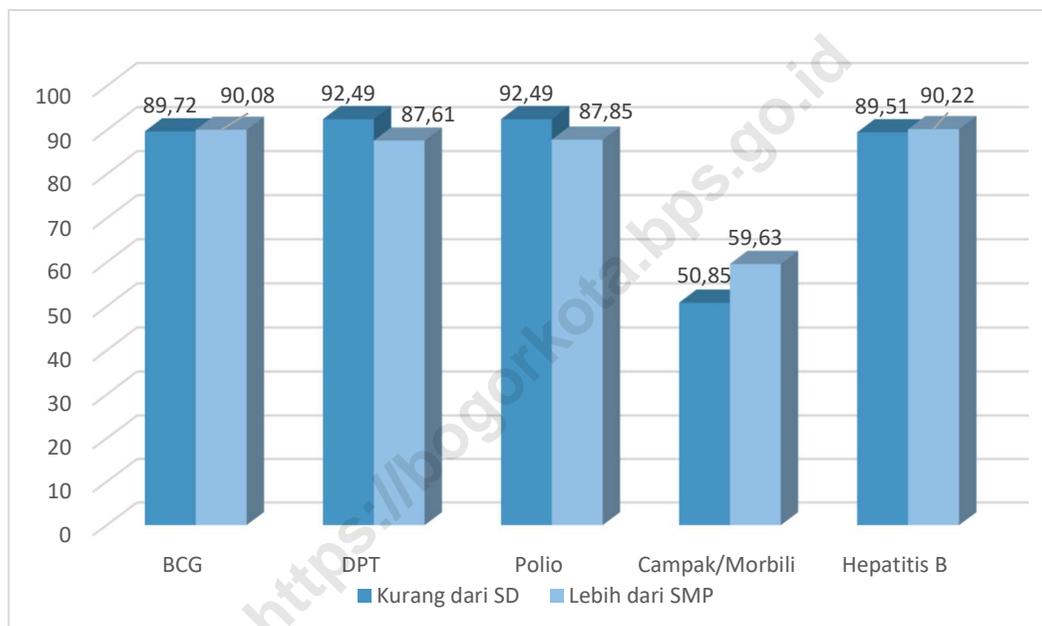
ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Air Susu ibu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Berdasarkan hasil Susenas 2022, menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2022 persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah sebesar 96,89 persen, dengan rata-rata lamanya pemberian ASI 10,5 bulan. Sebanyak 97,95 persen bayi laki-laki pernah diberi ASI, sedangkan bayi perempuan 95,62 persennya pernah diberi ASI. Dengan rata-rata lama pemberian ASI untuk bayi perempuan 11,2 bulan, sedangkan untuk bayi laki-laki rata-rata lamanya diberi ASI lebih singkat yaitu 9,9 bulan. Bisa dikatakan bahwa kesadaran masyarakat di Kota Bogor mengenai pentingnya ASI memang sudah cukup baik.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan bagi kesehatan dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi

wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B, sedangkan beberapa imunisasi yang dianjurkan seperti Typus, influenza, MMR dan masih banyak lagi.

**Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Bogor Tahun 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2021

Berdasarkan hasil Susenas yang dilakukan di wilayah Kota Bogor 2022, hampir semua balita yang ada di Kota Bogor pernah mendapatkan imunisasi wajib. Grafik 2.3 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen balita mendapat imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Pada tahun 2022 persentase terbesar adalah imunisasi polio untuk semua kelompok pendidikan kepala keluarga. Meskipun sudah banyak balita yang mendapatkan imunisasi, namun balita yang sudah memperoleh imunisasi lengkap di Kota Bogor masih di bawah 50 persen (47,22 persen).

### **2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan**

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangatlah penting dalam mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010. Dari seluruh perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin, sebanyak 91,53 persen melahirkan dibantu oleh tenaga kesehatan pada tahun 2022. Hal ini berarti bahwa kesadaran masyarakat Kota Bogor terhadap penolong kesehatan oleh tenaga kesehatan semakin tinggi. Meskipun begitu, masih ada kelahiran yang ditolong oleh dukun beranak/paraji. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor pendidikan ibu, faktor budaya dan faktor ekonomi keluarga. Jika hal ini masih terus berlangsung maka dapat menjadi masalah besar. Untuk itu perlu peningkatan pemahaman kesehatan dan pendampingan yang baik terhadap praktek paraji/dukun beranak.

Faktor lain yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat. Menurut data Susenas 2022 yang diperoleh, ada beberapa tempat rawat jalan yang jadi pilihan masyarakat dalam sebulan terakhir, seperti rumah sakit, Puskesmas/Pustu, atau fasilitas kesehatan lainnya. Dari beberapa tempat berobat tersebut, di Kota Bogor persentase terbesar tempat rawat jalan yang dipilih masyarakat adalah Klinik/Praktek Dokter Bersama sebanyak 36,69 persen, dan yang memilih tempat rawat jalan di Puskesmas/Pustu yaitu sebesar 24,80 persen,

kemudian diikuti tempat rawat jalan di rumah sakit swasta sebesar 16,46 persen.

**Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Tahun 2022**

<b>Kelompok Pengeluaran</b>	<b>Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan</b>
40 Persen Terbawah	70,26
40 Persen Tengah	54,14
20 Persen Teratas	58,63
<b>Kota Bogor</b>	<b>61,76</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2021

Program pemerintah untuk meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat adalah dengan dicanangkannya program bantuan subsidi jaminan kesehatan. Program tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) yang telah disepakati dalam sidang WHO *Executive Board* ke 144 tahun 2019 (Kemenkes, 2021). Akan tetapi belum seluruh penduduk menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan di berbagai fasilitas kesehatan. Kelompok pengeluaran 40 persen terbawah merupakan kelompok yang paling banyak menggunakan jaminan kesehatan (70,26 persen). Sementara untuk seluruh penduduk di Kota Bogor, baru 61,76 persen yang sudah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

## 3 Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan

lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

### 3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Bogor sudah cukup baik, hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2022 mencapai 99,69 persen. Penduduk Kota Bogor yang buta huruf sama sekali sebesar 0,02 persen.

**Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis Tahun 2022**

Kelompok Pengeluaran	Kemampuan Membaca		
	Huruf Latin	Huruf Lainnya	Buta Huruf
40 persen Terbawah	100,00	78,13	0,00
40 persen Tengah	99,50	75,82	0,50
20 persen Teratas	99,56	75,38	0,44
<b>Kota Bogor</b>	<b>99,69</b>	<b>76,56</b>	<b>0,31</b>

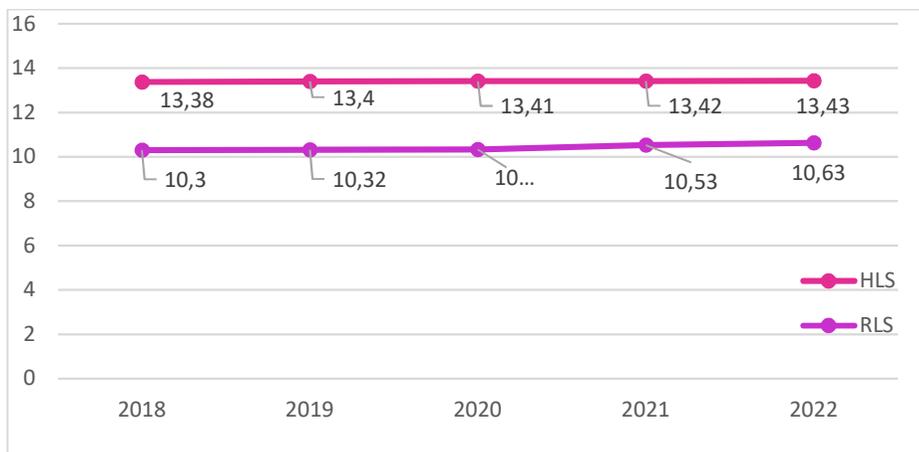
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sedikit lebih besar dari pada perempuan, penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis sebesar 99,75 persen dan perempuan sebesar 99,63 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Bogor yang bisa membaca dan menulis huruf lainnya juga cukup besar yaitu sebesar 76,56 persen.

### 3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2022, Harapan Lama Sekolah di Kota Bogor telah meningkat sebesar 0,01 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah juga meningkat sebesar 0,1 pada tahun 2022. Indikator ini menunjukkan harapan yang positif bagi peningkatan pendidikan di Kota Bogor.

**Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama sekolah di Kota Bogor , 2018-2022**



*Sumber : IPM, 2022*

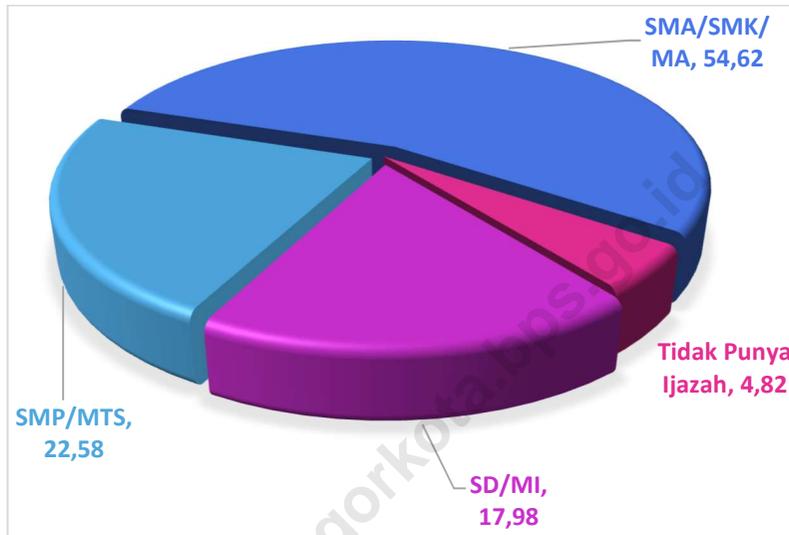
Selama periode lima tahun terakhir, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,01 persen. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa bertambahnya lama sekolah yang diharapkan akan dirasakan penduduk pada umur tertentu di masa yang akan datang. Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Kota Bogor telah mencapai 13,43 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor adalah 10,63 tahun pada 2022. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Bogor mengalami pertumbuhan yang positif, hal ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Bogor yang lebih baik. Hingga tahun 2022, secara rata-rata penduduk Jawa Barat usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X.

### **3.3 Tingkat Pendidikan**

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian, dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

**Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Berdasarkan data hasil Susenas 2022, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Bogor persentase paling besar yang memiliki ijazah tertinggi adalah ijazah SMA/SMK/MA atau di atasnya yaitu 57,62 persen, kemudian SMP/MTS sebesar 22,58 persen, dan ijazah SD/MI yaitu sebesar 17,98 persen. Pemerintah daerah masih berusaha agar program wajib belajar 9 tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan ijazah SMP dan di atasnya.

Pada tahun 2022 sudah sebanyak 0,45 persen dari penduduk yang berumur 7 - 24 tahun ke atas belum atau tidak pernah bersekolah. Sebanyak 27,94 persen sudah tidak bersekolah lagi. Sebanyak 33,89 persen masih bersekolah pada tingkat setara SD, sedangkan yang masih bersekolah di

tingkat SMP sebesar 12,91 persen, dan masih bersekolah SMA ke atas sebesar 24,81 persen.

**Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kota Bogor, 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

### 3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

### Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data Susenas 2022 di Kota Bogor pada tahun 2012, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,93 persen. Sementara untuk kelompok umur 13-15 tahun APS di level 95,06 persen dan pada kelompok umur 16-18 hanya di level 66,09 persen.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Bogor , 2022**

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Sekolah		
	7 – 12	13 - 15	16 - 18
Laki-laki	99,89	97,19	69,12
Perempuan	100,00	94,69	60,40
Total	99,93	95,06	66,09

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2021

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan untuk kelompok umur 13-18 tahun. APS perempuan di kelompok umur 7-12 tahun sebesar 100 persen dan laki-laki sebesar 99,89 persen, sedangkan APS perempuan di kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,69 persen dan laki-laki sebesar 97,19 persen. Pada kelompok umur 16-18 tahun APS perempuan sebesar 60,40 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki dengan APS sebesar 69,12 persen. Perbedaan APS penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan seberapa besar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, semakin kecil perbedaan APS maka semakin merata pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Pada

kelompok umur 7-12 tahun kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan masih relatif tinggi, masih ada sebesar 39,60 persen penduduk perempuan usia 16-18 tahun yang tidak menduduki jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

### Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah yang dilihat melalui kelompok umur, Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA. Grafik 3.5 menunjukkan bahwa APM SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD. Jika diperhatikan secara keseluruhan nilai APM di semua jenjang mengalami peningkatan pada tahun 2022.

**Grafik 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Bogor, 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Nilai APM perempuan lebih tinggi dibanding APM laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan

Kota Bogor usia 7-15 tahun lebih banyak memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia di jenjang pendidikan SD dan SMP, baik formal maupun non formal. Sedangkan nilai APM perempuan pada jenjang usia SMA lebih kecil dibandingkan dengan nilai APM laki-laki, hal ini sejalan dengan nilai APS.

APS dan APM tersebut memberikan gambaran bahwa masih terdapat kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan SMA. Kesenjangan-kesenjangan tersebut bisa disebabkan oleh fasilitas pendidikan yang belum memadai, faktor ekonomi, maupun akses yang masih belum terjangkau oleh wilayah perdesaan atau wilayah yang jauh. Oleh karena itu pemerintah masih harus terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan, fasilitas dan mempermudah akses penduduk ke tempat sekolah.

## 4 Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan

wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

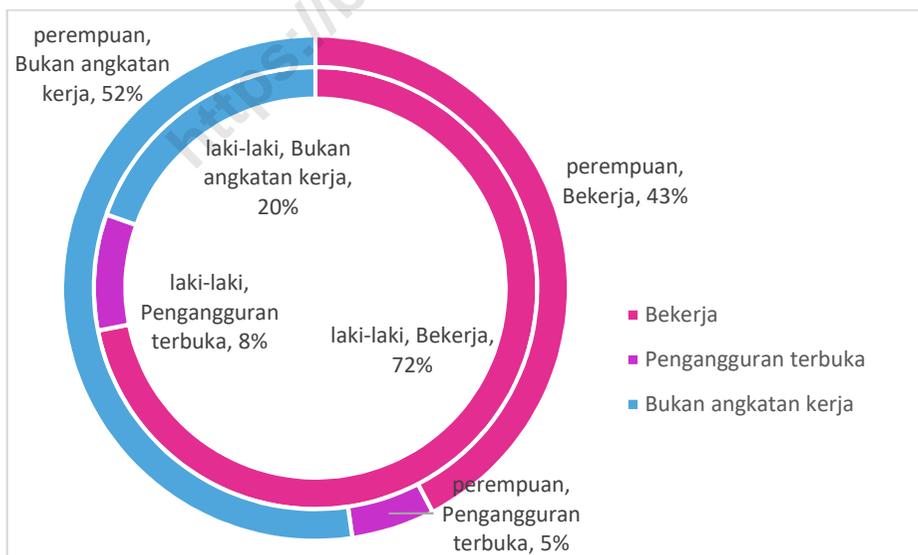
#### **4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan dapat digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian dari hasil pembangunan di suatu wilayah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan persentase perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu merupakan persentase

perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

**Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Bogor, Agustus 2022**

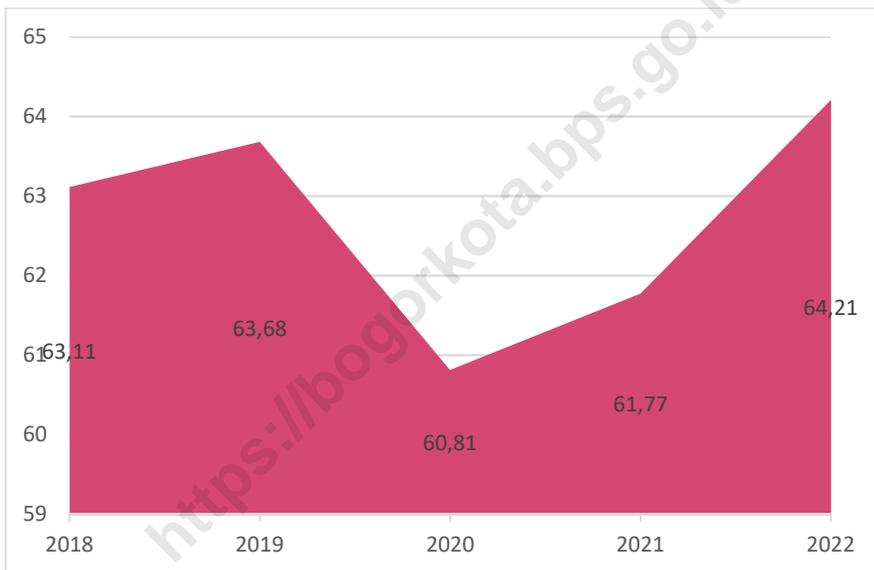


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Bogor pada Agustus 2022 sebanyak 866.776 orang, bertambah sebanyak 10.307 orang

dibandingkan 2021. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2022 mencapai 556.541 orang, bertambah sebanyak 27.538 orang dibanding Agustus 2021.

**Grafik 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
di Kota Bogor, 2018 - 2022**

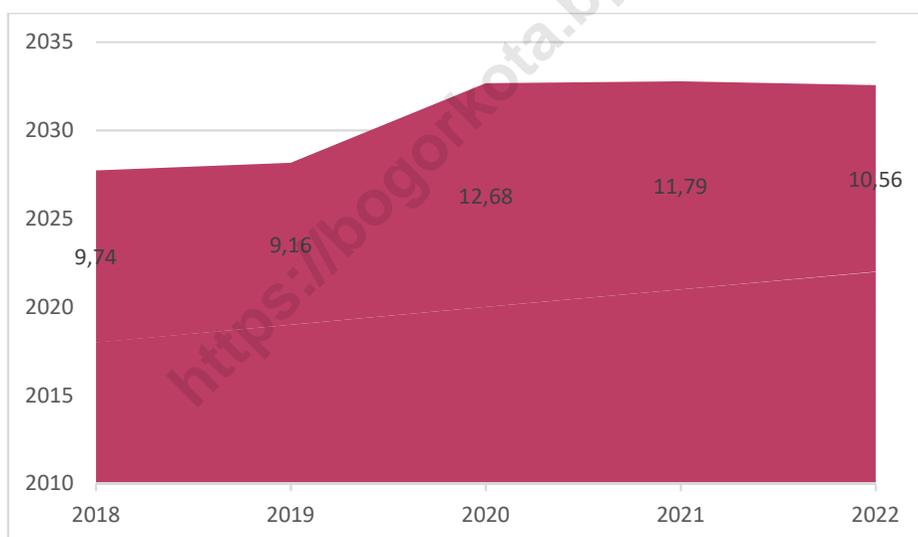


Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa TPAK Kota Bogor pada tahun 2018 – 2022 mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. TPAK Kota Bogor secara berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 TPAK Kota Bogor menurun cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya menjadi 63,68 persen. Penurunan TPAK ini mengindikasikan adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sedangkan pada dua tahun berikutnya TPAK kembali meningkat hingga mencapai nilai 64,21 persen.

Grafik 4.3 menunjukkan adanya peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19 karena kegiatan operasional tempatnya bekerja mengalami penutupan ataupun pengurangan tenaga kerja. Pada tahun 2021-2022, nilai TPT mulai mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut menjadi sebesar 10,56 persen. Hal ini menunjukkan mulai stabilnya kondisi perekonomian di Kota Bogor yang mulai berangsur-angsur pulih karena Covid-19.

**Grafik 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
di Kota Bogor, 2018 – 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

#### **4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan**

Harapan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan juga akan meningkatkan kesempatan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan yang

lebih baik. Akan tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia untuk pekerja dengan pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Sementara sebagian besar dari lulusan pendidikan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. Hal tersebut akan menyebabkan sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

**Grafik 4.4 Jumlah Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Bogor, 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Kondisi penduduk angkatan kerja yang menganggur di Kota Bogor pada tahun 2022 ditunjukkan pada Grafik 4.4. yang paling banyak adalah berijazah SLTA/ sederajat, yaitu mencapai 37.652 orang. Sedangkan jumlah pengangguran terendah adalah pada dengan ijazah SMP sebesar 5.569 orang. Jumlah laki-laki yang menjadi pengangguran lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan. Dari total 59.971 penduduk yang menganggur, sebanyak

62,02 persen (37.194 orang) adalah penduduk laki-laki dan 37,98 persen (22.777 orang) penduduk perempuan.

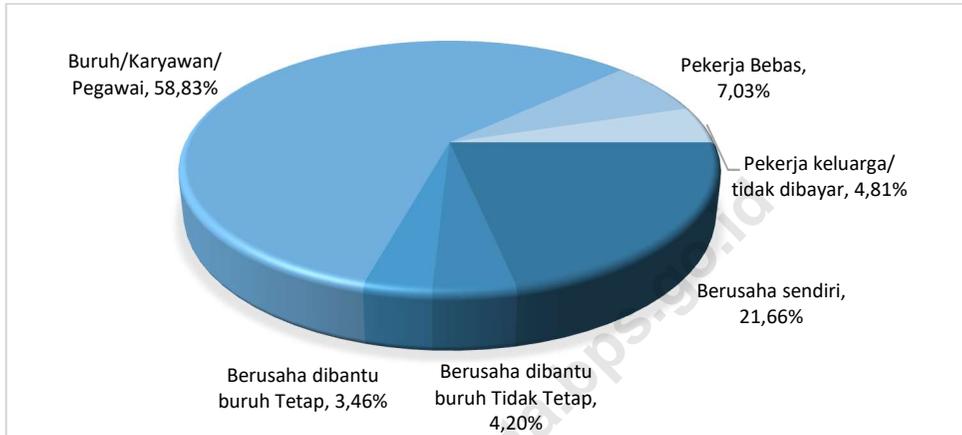
Pada tahun 2012, Pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, meningkat dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Dorongan pemerintah terhadap masyarakat untuk meningkatkan pendidikannya harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, agar potensi yang dimiliki dapat berkontribusi positif dalam pembangunan. Masih tingginya tingkat pengangguran pada penduduk yang memiliki ijazah SMA masih merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bogor.

Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha dan membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi dukungan modal serta pendampingan bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

#### **4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan**

Selama periode 2022 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada 2022 mencapai 294.822 orang atau sebesar 59,37 persen.

**Grafik 4.5 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Bogor, Agustus 2021**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2021

# 5 Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah.

Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

Dengan kata lain rumah tangga cenderung termasuk rumah tangga sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

### **5.1 Pengeluaran Rumah Tangga**

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, pengeluaran untuk bukan makanan cenderung semakin tinggi. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Rata rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan dan bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata – rata sebulan

Pada tahun 2022, Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita sebulan Rp. 751.435 rupiah. Sedangkan untuk Rata-rata Pengeluaran Bukan Makanan per kapita Sebulan Rp. 1.040.157 Rupiah . Kelompok pengeluaran perkapita di kelompokan menjadi tiga, yaitu kelompok 40 persen terbawah dengan rata-rata sebesar 722.790 rupiah, kelompok 40 persen Tengah sebesar RP. 1.481.225 rupiah, dan kelompok pengeluaran 20 persen teratas sebesar Rp.4.562.014 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi atau pola pengeluaran di Kota Bogor cukup tinggi.

**Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Jenis Pengeluaran di Kota Bogor, 2022**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran per Kapita sebulan		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
Makanan	417.277	748.517	1.429.354
Non Makanan	305.514	732.708	3.132.660
Total	722.790	1.481.225	4.562.014

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kota Bogor 2021. Tabel tersebut menggambarkan jarak rata-rata pengeluaran yang cukup jauh antara kelompok pengeluaran rendah dan kelompok pengeluaran tinggi. Pada tahun 2021 di Kota Bogor tampak bahwa proporsi konsumsi non makanan pada kelompok pengeluaran tinggi jauh lebih besar dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Pengeluaran non makanan pada penduduk kelompok pengeluaran tinggi mencapai lebih dari tiga juta per kapita atau setara 69,12 persen dari total pengeluaran. Sebaliknya, pada kelompok pengeluaran 40 % terbawah, pengeluaran

dominannya masih pada pengeluaran kelompok komoditas makanan, mencapai 449.382 rupiah atau berkisar 40,42 persen dari total pengeluarannya.

**Tabel 5.2 Persentase Pengeluaran Menurut Kelompok Barang dan Kelompok Pengeluaran di Kota Bogor, 2022**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran per Kapita sebulan		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
Makanan	57,73	50,53	68,67
Non Makanan	42,27	49,47	31,33
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Jika dilihat dari pengeluaran menurut kelompok barang, maka pada tahun 2022, seperti tahun-tahun sebelumnya, penduduk di Kota Bogor masih mengeluarkan uang paling banyak untuk kelompok makanan. Konsumsi makanan dan minuman jadi, Rokok, serta padi-padian merupakan kelompok dengan pengeluaran yang terbesar pada Kelompok Makanan. Pengeluaran rokok mencapai 10,98 persen dari total pengeluaran makanan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, karena akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan penduduk di Kota Bogor. Pengeluaran untuk rokok di Kota Bogor jauh melampaui pengeluaran per kapita untuk makanan-makanan bergizi seperti telur dan susu (7,09 persen), daging (7,01 persen) dan ikan (6,57 persen). Pada kelompok non makanan, pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga memiliki andil yang cukup besar.

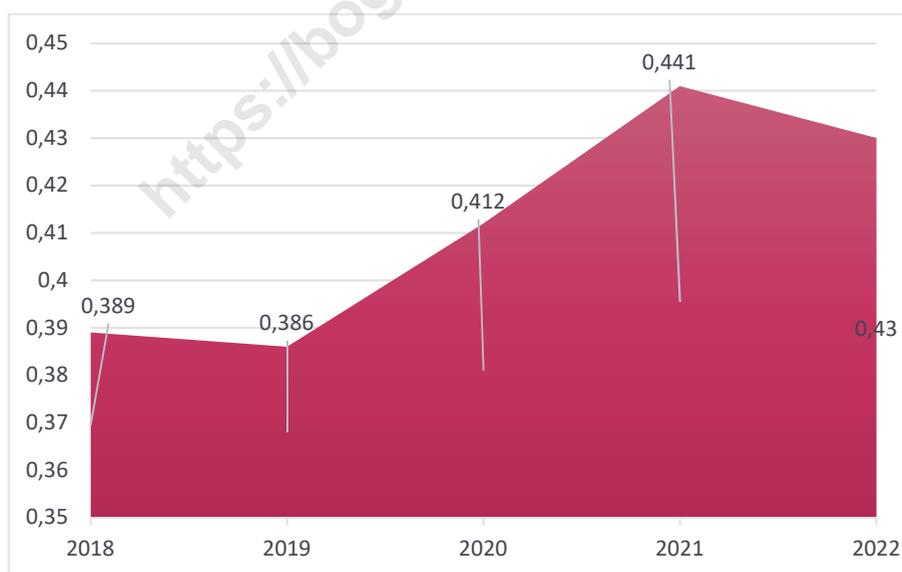
**Tabel 5.3 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan  
Menurut Kelompok Barang di Kota Bogor, 2022**

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			Rata-rata Pengeluaran
	40 persen Terbawah	40 Persen Tengah	20 Persen Teratas	
Padi-padian	55.032	67.752	97.427	68.569
Umbi-umbian	5.098	8.119	16.143	8.508
Ikan/udang/cumi/kerang	29.743	49.567	124.180	56.500
Daging	23.866	45.004	106.596	48.811
Telur dan susu	30.973	40.171	105.757	49.567
Sayur-sayuran	36.969	55.743	88.148	54.675
Kacang-kacangan	9.451	15.108	21.565	14.126
Buah-buahan	12.549	29.372	88.872	34.493
Minyak dan kelapa	12.096	20.803	34.822	20.106
Bahan minuman	12.654	20.988	26.216	18.687
Bumbu-bumbuan	8.944	13.841	26.051	14.312
Konsumsi lainnya	10.946	16.027	24.853	15.749
Makanan dan minuman jadi	119.913	260.968	563.913	264.808
Rokok dan Tembakau	49.041	105.053	104.811	82.525
<b>Jumlah Makanan</b>	<b>417.277</b>	<b>748.517</b>	<b>1.429.354</b>	<b>751.435</b>
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	190.405	461.134	1.690.338	597.762
Aneka barang dan jasa	70.706	156.891	820.483	254.718
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	13.904	30.803	91.225	36.078
Barang tahan lama	4.627	19.830	225.999	54.868
Pajak, pungutan, dan asuransi	25.012	59.037	266.617	86.603
Keperluan pesta dan upacara/Kenduri	860	5.013	37.998	9.928
<b>Jumlah Bukan Makanan</b>	<b>305.514</b>	<b>732.708</b>	<b>3.132.660</b>	<b>1.040.157</b>
<b>Rata-rata Pengeluaran</b>	<b>722.790</b>	<b>1.481.225</b>	<b>4.562.014</b>	<b>1.791.592</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah Indeks Gini.

**Grafik 5.1 Indeks Gini Rasio Kota Bogor, 2018 - 2022**



Sumber : Tabel Dinamis Jumlah Penduduk Miskin 2022, <http://jabar.bps.go.id>

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di suatu wilayah secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini

yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Grafik 5.1 menunjukkan bahwa Indeks Rasio Gini pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan sebesar 0,003, hal ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan sudah semakin baik. Sementara pada indeks gini rasio pada tahun 2020 dan tahun 2021 terus meningkat, yang berarti ketimpangan penduduk di Kota Bogor semakin tinggi. Kondisi ini merupakan akibat dari adanya pandemi covid-19, yang menyebabkan perekonomian kelompok penduduk miskin semakin turun dan meningkatkan ketimpangan dari distribusi pendapatan. Pada tahun 2022, nilai indeks rasio gini kembali mengalami penurunan, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **5.2 Konsumsi Energi dan Protein**

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

**Tabel 5.4 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan per Kapita per Bulan di Kota Bogor, 2021 – 2022**

Uraian	Tahun		
	2020	2021	Perubahan
Konsumsi kalori perkapita per hari (kkal)	2.088,72	1.904,69	184,03
Konsumsi protein perkapita per hari (gram)	61,16	57,10	-4,06
Persentase pengeluaran makanan per kapita per bulan	41,91	41,94	0,03
Persentase pengeluaran non makanan perkapita per bulan	58,09	58,06	-0,03

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein. Pada tahun 2022 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Bogor sebesar 1.904,69 kkal per kapita per hari, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2.088,72 kkal per kapita per hari. Ini berarti rata-rata konsumsi kalori per kapita penduduk Kota Bogor di tahun 2022 sudah di bawah syarat kecukupan gizi yang ditentukan. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita penduduk Kota Bogor di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2021 yaitu 57,10 gram per kapita per hari, sedangkan tahun 2021 sebesar 61,16 gram kapita per hari menurun sebesar 4,06 gram. Meskipun konsumsi protein perkapita penduduk Kota Bogor mengalami penurunan, masih memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

## 6 Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang.

Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya

### **6.1. Kualitas Rumah Tinggal**

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga sebuah rumah dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Tabel 6.1 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,4 persen. Pada tahun 2022, rumah di Kota Bogor yang ber dinding tembok/kayu sudah mencapai 99,58 persen. Selain luas lantai, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah

penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2022 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, dan asbes mencapai 100 persen

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Berkaitan dengan kriteria WHO tersebut, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup>.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Bogor, 2020 – 2022**

Indikator	Satuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Lantai bukan tanah	%	98,91	99,51	99,91
Atap beton/ genteng/sirap/seng/asbes	%	95,59	100	100
Dinding terluas tembok/kayu	%	99,85	99,35	99,58
Luas lantai perkapita $\geq$ 10 m <sup>2</sup>	%	82,02	81,49	85,53

Sumber : Statistik Kesejahteraan Propinsi Jawa barat 2022

Data hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan bahwa di Kota Bogor persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita  $\geq$  10 m<sup>2</sup> adalah sebesar 81,49 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2021,

maka terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita  $\geq 10$  m<sup>2</sup>.

## 6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

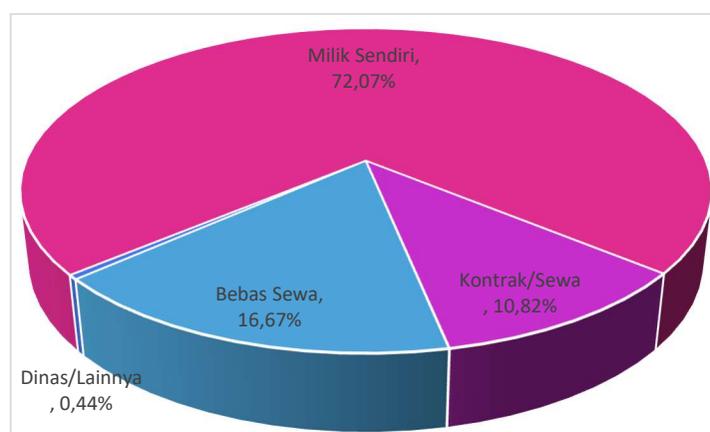
Rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2022 telah mencapai 96,37 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m. Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri adalah sebesar 91,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2022 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 71,92 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah listrik dan penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan hampir seluruh rumah tangga (99,74 persen) di Kota Bogor telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN.

### 6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

**Grafik 6.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Bogor , tahun 2022**



Sumber : Statistik Kesejahteraan Propinsi Jawa barat 2022

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 72,07 persen, sisanya 27,93 persen adalah status kepemilikan tempat tinggal bukan milik sendiri, yang terdiri kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya.

## 7 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

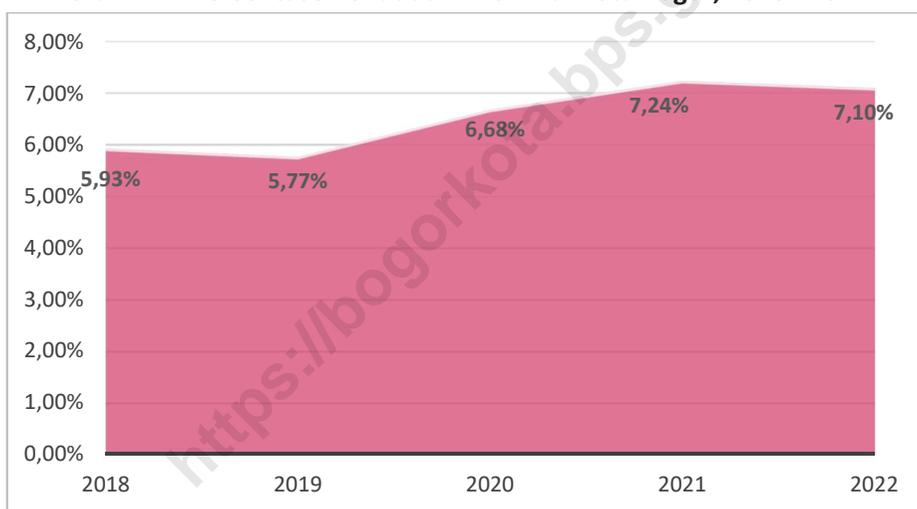
Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

### **7.1 Dinamika Jumlah Penduduk Miskin**

Penduduk miskin di Kota Bogor secara total menunjukkan tren menurun selama periode 2017-2019. Tren penduduk miskin kemudian mengalami perubahan pada tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab utama naiknya jumlah penduduk miskin, yang kemudian memberikan dampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun

2020 jumlah penduduk miskin di Kota Bogor mencapai 6,68 persen (75.040 jiwa) dan masih mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga mencapai angka 7,24 persen (80.090 jiwa). Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun hingga mencapai 7,10 persen (79.500). Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Bogor untuk dapat menekan angka kemiskinan dan menghentikan tren peningkatan jumlah penduduk miskin sudah mulai menunjukkan hasil.

**Grafik 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kota Bogor, 2018 - 2022**



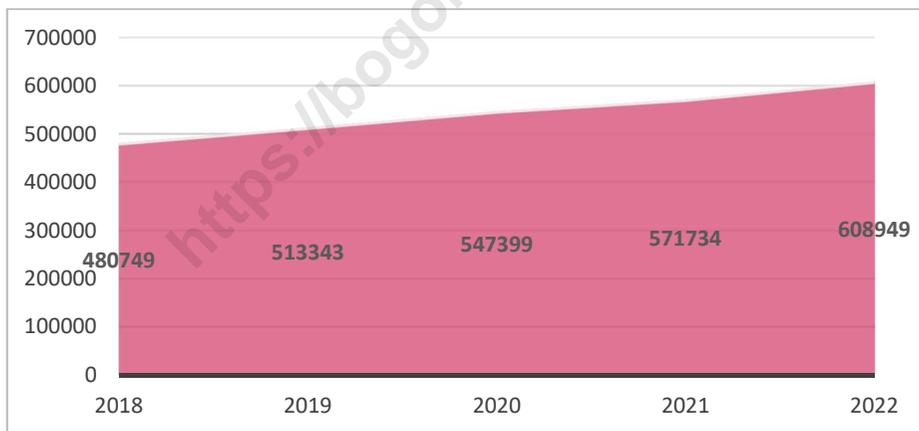
*Sumber : Kota Bogor dalam angka*

Sebagian besar rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga dengan usia 50 tahun keatas. Hal tersebut disebabkan karena produktivitas penduduk usia 50 tahun keatas jauh menurun dibandingkan dengan penduduk dibawah 50 tahun. Sementara itu, sebanyak 88,70 persen rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga laki-laki, dan 11,30 persen pada kepala rumah tangga perempuan.

## 7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Bogor mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2018-2022, tahun 2018 sebesar Rp 480.749 dan terus mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa, hingga pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp 608.949

**Grafik 7.2 Garis Kemiskinan di Kota Bogor, 2018 – 2022  
(Rupiah/Kapita/Bulan)**

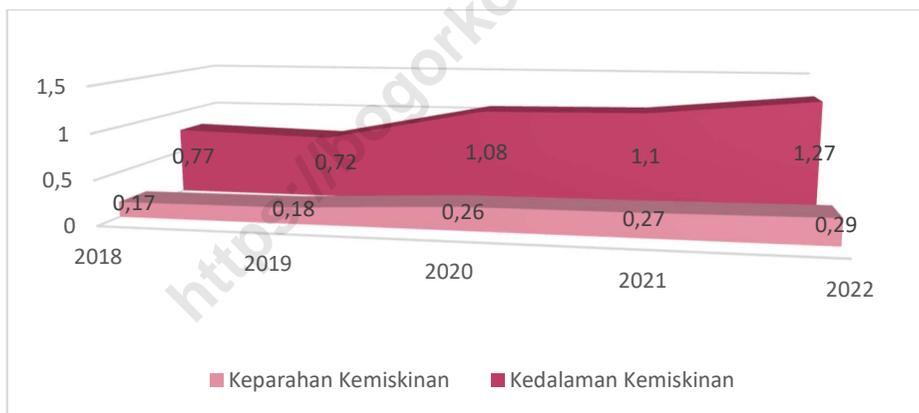


Sumber : Kota Bogor Dalam Angka

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2018 – 2019 P1 di Kota Bogor mengalami penurunan dari 0,77 hingga menjadi 0,72. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Sementara itu adanya pandemi covid pada akhir

tahun 2019 hingga 2022 menyebabkan meningkatnya nilai kedalaman kemiskinan hingga mencapai nilai 1,27. Kedepannya, pemerintah terus berusaha agar nilai P1 yang semakin kecil, sehingga penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih diprioritaskan wilayah Kota Bogor untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam”.

**Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Bogor, 2018 - 2022**



Sumber : Kota Bogor Dalam Angka

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami kenaikan. Pada 2018 P2 pada level 0,17 sedangkan pada 2022 menurun pada level 0,29. Peningkatan nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin

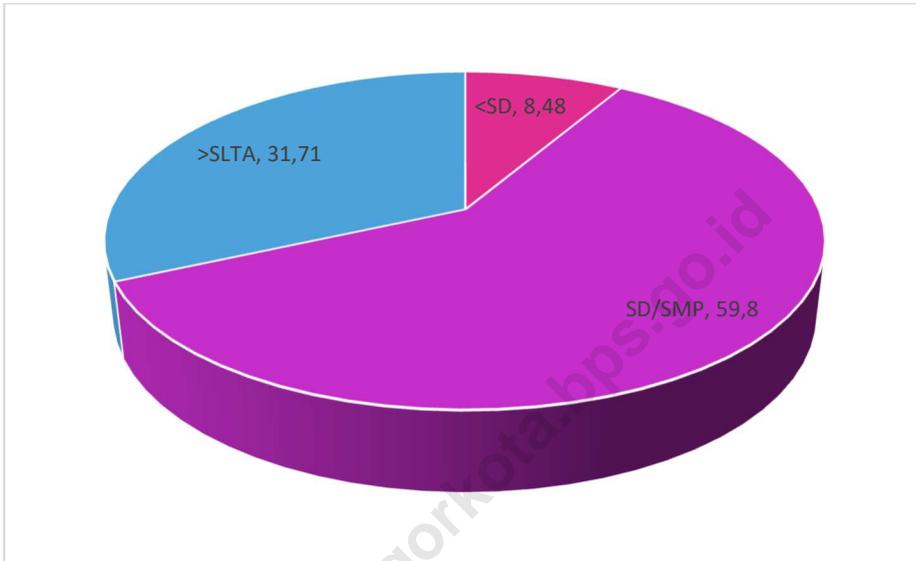
tinggi. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks, semakin rendah pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

### **7.3 Karakteristik Pendidikan**

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan. Peningkatan tingkat pendidikan anggota rumah tangga miskin dapat menjadi kunci pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu pekerjaan besar pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan adalah peningkatan pendidikan penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin di Kota Bogor menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2022 menunjukkan fenomena yang cukup menarik. Pada tahun 2022, penduduk miskin di Kota Bogor sebagian besar merupakan tamat SD/SLTP, sebesar 59,80 persen. Fenomena yang terjadi adalah bahwa lulusan SLTA atau lebih yang berstatus miskin lebih tinggi dibandingkan mereka yang tamat kurang dari SD. Menunjukkan perlunya sekolah terbuka atau sekolah paket C bahwa pendidikan dapat menjadi solusi seseorang keluar dari kemiskinan.

**Grafik 7.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bogor, Tahun 2022**



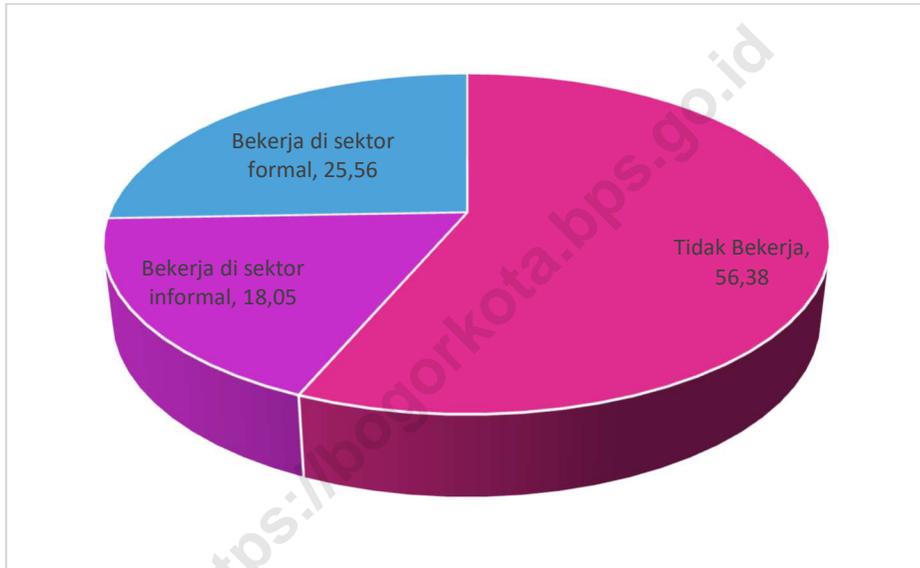
Sumber : KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 2017-2022

#### **7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan**

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mencapai 52 persen pada tahun 2022. Tingginya kemiskinan pada penduduk yang tidak bekerja, memberikan pemerintah harus lebih meningkatkan program pengentasan kemiskinan melalui perluasan jumlah lowongan kerja. Potret kemiskinan di Kota Bogor menggambarkan bahwa kenaikan batas garis kemiskinan pada 2022 yang mencapai 608.949,- membuat penduduk miskin yang tidak bekerja bekerja di sektor informal meningkat dari 52,31 persen menjadi 56,38 persen. Kelompok penduduk miskin yang tidak bekerja dan mereka yang bekerja di sektor

informal merupakan kelompok yang paling rentan dari adanya pergerakan batas garis kemiskinan.

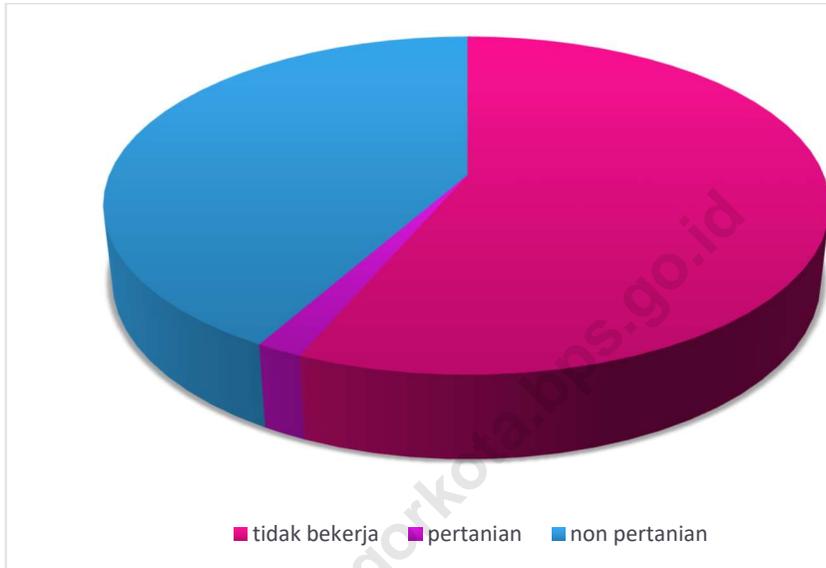
**Grafik 7.5 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Bogor, Tahun 2022**



Sumber : KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 2017-2022

Sesuai dengan karakteristik Kota Bogor sebagai daerah urban, maka persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian hanya sedikit, yaitu 1.76 persen pada 2022. Peningkatan angka kemiskinan mereka yang bekerja di Sektor Pertanian ini mengindikasikan semakin berkurangnya ketersediaan akses dan lahan pertanian bagi lapangan pekerjaan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan infrastruktur wilayah, pada satu sisi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

**Grafik 7.6 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Bekerja di Kota Bogor, Tahun 2022**

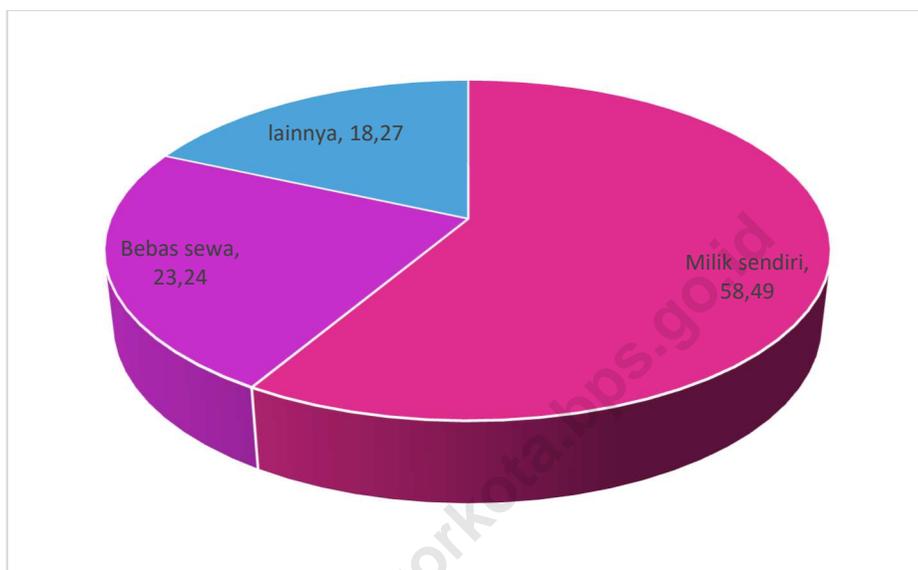


Sumber :  
KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 2016-2022

### 7.5 Karakteristik Perumahan

Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah perumahan. Rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang besar. Jika dihubungkan dengan luas lantai per kapita, setiap anggota rumah tangga miskin memiliki ruang gerak yang terbatas. Kondisi ini ditunjukkan oleh persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai per kapita di atas 15 meter persegi yang masih rendah. Adanya keterbatasan untuk leluasa melakukan kegiatan di dalam rumah yang sempit menandakan kualitas hidup yang lebih rendah dibanding mereka yang lebih leluasa beraktivitas di dalam rumah (TNP2K, 2010).

**Grafik 7.7 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kota Bogor, Tahun 2022**



Berdasarkan Grafik 7.5 sebesar 58,49 persen rumah tangga miskin tinggal di rumah milik sendiri dan 23,24 rumah tangga tinggal di rumah bebas sewa. Kepemilikan tenoat tinggal akan meringankan rumah tangga miskin yang tinggal di rumah sendiri dan bebas sewa, karena mereka dapat menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk kebutuhan lainnya selain untuk biaya tempat tinggal. Sudah semua rumah tangga miskin tinggal di dalam rumah yang lantainya bearalaskan bukan tanah atau bambu. Rumah tangga miskin yang mengakses air layak mencapai 85,35 persen. Sebanyak 100 rumah tangga miskin sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding tembok.

Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih. Air bersih sebagai sumber air minum merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah

tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010). Ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Jawa Barat sudah cukup memadai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan fasilitas jamban sendiri/bersama mencapai 100 persen pada tahun 2022.

#### **7.6 Dukungan Pemerintah yang Kepada Rumah Tangga Miskin**

Untuk menjalankan pengentasan kemiskinan, pemerintah banyak memberikan program-program demi meringankan beban rumah tangga miskin, di antaranya pemberian subsidi dan bantuan pangan, pendidikan, dan program sosial. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima bantuan non tunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Program Sembako adalah pengembangan dari program BPNT. Nilai dari Program Sembako sebesar Rp150.000,- per bulan. Kriteria pangan yang diperoleh adalah pangan bernutrisi dan bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat, KPM diberikan kebebasan untuk memilih bahan pangan tersebut.

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. PIP terbagi menjadi dua yakni Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Pendidikan Tinggi).

Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

**Tabel 7.1 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Pernah Menerima Program Raskin, Program Indonesia Pintar, Kartu Perlindungan Sosial dan Program Keluarga Harapan di Kota Bogor, 2020 – 2022**

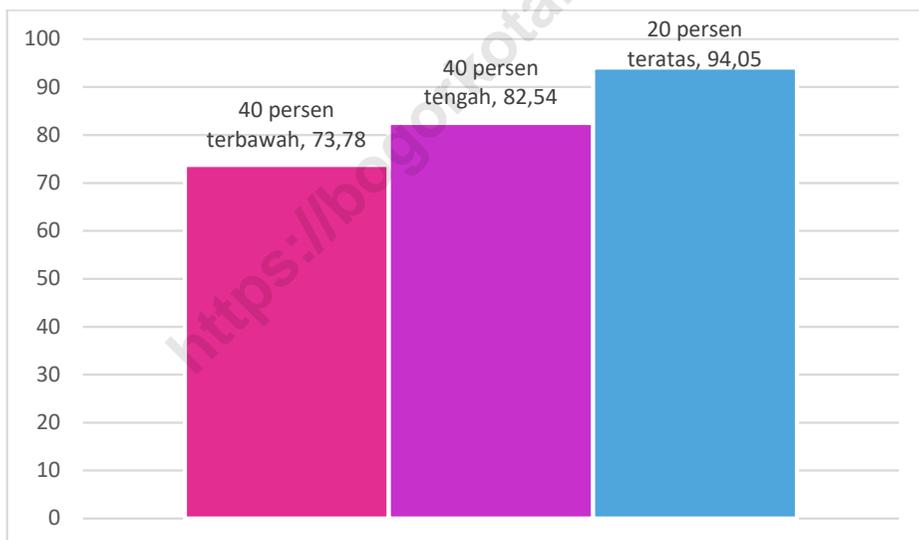
Jenis Program Perlindungan Sosial	Tahun		
	2020	2021	2022
Raskin/Rastra/BPNT/Sembako	9,27	13,22	19,45
Program Indonesia Pintar (PIP)	8,01	6,66	n.a
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	7,31	11,15	16,30
Program Keluarga Harapan (PKH)	5,6	9,22	13,11

Sumber : Statistik kesejahteraan kota Bogor 2022

Tabel 7.1 menunjukkan persentase rumah tangga miskin yang menerima Program bantuan dari pemerintah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah penerima KPS/KKS serta PKH mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Meningkatnya bantuan yang diterima rumah tangga miskin diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan asupan gizi rumah tangga miskin.

### 7.7. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

**Grafik 7.8. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut di Kota Bogor, 2022**



Sumber :Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor 2022

Akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan

wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Secara umum jumlah rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 4,19 persen di tahun 2022. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Di tahun 2022 persentase penduduk Kota Bogor berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam 3 bulan terakhir mencapai 97,34 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap komputer dan laptop pada tahun 2022 sebesar 28,33 persen dari total penduduk di Kota Bogor.

Terkait penggunaan Telepon Seluler dan Komputer, berdampak pada kemudahan akses internet. Media internet digunakan karena memiliki sifat instan, interaktif dan menarik. Pada tahun 2022 mayoritas penduduk Kota Bogor berumur 5 tahun ke atas mengakses internet melalui telepon seluler.

**BerAKHLAK**

berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BOGOR



Jl. Layungsari III No 13 Kota Bogor 16132 Jawa Barat

Telp : (0251) 8324579; Fax : (0251) 8327641;

Email : bps3271@bps.go.id